

RENCANA KERJA TAHUN 2022



**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI MALUKU**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun lalu	
2.1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018.....	4
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	13
2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1. Tujuan dan sasaran RENJA Badan Penghubung	20
3.2. Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV. Penutup.....	22

EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi 2021		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renja OPD tahun 2020	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan renja PD tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1		Program pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan;	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Operasional OPD dalam Medukung tugas pokok dan fungsi	100	3.333.778.603	100	2.049.981.917	100	2.848.985.840	17	475.990.242	33	952.291.215	54	1.538.148.352	87	2.471.967.293	100	5.438.397.102	19,405	7.488.379.019	25,02	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	298.771.436	100	438.900.000	100	270.800.000	23	61.039.784	45	121.799.455	67	180.481.757	91	245.800.000	100	609.120.996	2,25	1.048.020.996	3,51	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	terrealisasinya pembayaran rekening telepon,air dan listrik	100	759.170.475	39	213.424.606	100	655.800.000	18	116.448.228	38	249.072.468	58	378.875.445	78	511.076.070	100	1.255.472.211	1,91	1.468.896.817	1,93	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Prosentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	100	146.225.402	93	102.626.146	pada	170.300.000	0	-	1	1.500.000	18	30.822.261	56	95.766.373	100	128.088.634	0,75	230.714.780	1,58	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terrealisasinya ketersediaan jasa kebersihan kantor perwakilan	100	30.387.656	95	57.192.500	100	25.000.000	25	6.206.000	43	10.751.000	63	15.695.000	100	24.990.000	100	57.642.000	2,31	114.834.500	3,78	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase tersedianya kebutuhan alat tulis kantor perwakilan	100	33.637.920	100	25.000.000	100	27.674.000	19	5.232.500	31	8.706.500	55	15.345.500	100	27.670.000	100	56.954.500	2,06	81.954.500	2,44	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggadaan	prosentase tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	21.879.113	100	23.110.000	100	18.000.000	24	4.406.000	30	5.406.000	62	11.106.000	100	18.000.000	100	38.918.000	2,16	62.028.000	2,84	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	100	36.405.188	20	14.163.000	100	30.000.000	14	4.125.000	28	8.300.000	63	18.988.000	100	29.963.000	100	61.376.000	2,05	75.539.000	2,07	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase penyediaan/pembelian jenis makana dan minuman untuk pejabat,tamu dan kegiatan rapat.	100	243.101.250	75	230.765.665	100	200.000.000	19	38.948.298	38	76.318.400	67	133.970.644	99	198.684.344	100	447.921.686	2,24	678.687.351	2,79	Badan Penghubung Provinsi
		Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah Dalam rangka koordinasi rapat-rapat konsultasi.	100	673.390.463	100	341.500.000	25 Kali	554.000.000	17	96.015.792	17	96.015.792	30	166.879.265	86	475.580.866	33 Kali	834.491.715	1,51	1.175.991.715	1,75	Badan Penghubung Provinsi
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran.	Jumlah Pegawai Kotrak	100	1.090.809.700	95	603.300.000	27 orang	897.411.840	16	143.568.640	42	374.421.600	65	585.984.480	94	844.436.640	27 orang	1.948.411.360	2,17	2.551.711.360	2,34	Badan Penghubung Provinsi
2		Program Peningkatan Sarana Prsarana Aparatur Kegiatan;	prosentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur sesuai standar Daerah	100	2.388.599.850	1.959.265.043	100	9.880.657.000	3	291.730.958	5	467.698.085	9	851.937.348	93	9.166.948.772	100	10.778.315.163	12,707	12.737.580.206	14,89	Badan Penghubung Provinsi	
		Pengadaan Mobil Jabatan / Operasional	Jumlah Mobil Jabatan/Operasional	-	0	1 unit	495.462.000	4 unit	7.819.657.000	0	-	0	-	0	-	98	7.683.225.470		7.683.225.470	0,98	8.178.687.470	-	Badan Penghubung Provinsi
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	prosentase tercukupinya peralatan gedung Kantor Perwakilan.	2 unit	85.000.000	100	30.000.000	2 unit	55.000.000	0	-	0	-	0	-	100	55.000.000	2 unit	55.000.000	1,00	85.000.000	1,00	Badan Penghubung Provinsi
		Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	1 bh	18.232.594	100	12.349.955	1 bh	15.000.000	41	6.150.000	41	6.150.000	73	10.880.000	97	14.600.000	1 bh	37.780.000	2,52	50.129.955	2,75	Badan Penghubung Provinsi

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi 2021	Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renja OPD tahun 2020	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan renja PD tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6x12	15 = 14/5x100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6x12	15 = 14/5x100%	16									
		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	3 gedung	36.465.188	21	55.236.500	3 gedung	30.000.000	0	-	0	-	84	25.125.000	100	30.000.000	3 gedung	55.125.000	1,84	110.361.500	3,03	Badan Penghubung Provinsi	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	10	2.100.394.800	69	1.264.891.770	12 unit	1.838.000.000	15	278.800.458	24	449.220.585	42	767.958.147	70	1.285.689.601	12 unit	2.781.668.791	1,51	4.046.560.561	1,93	Badan Penghubung Provinsi	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	15 unit	98.456.006	34	63.183.909	15 unit	81.000.000	4	2.980.500	5	3.980.500	26	21.364.201	70	56.766.701	15 unit	85.091.902	1,05	148.275.811	1,51	Badan Penghubung Provinsi	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	20 Unit	23.310.125	66	13.140.909	20 Unit	20.000.000	0	-	0	-	64	12.805.000	99	19.805.000	20 Unit	32.610.000	1,63	45.750.909	1,96	Badan Penghubung Provinsi	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Bercorak Kebudayaan	Jumlah Gedung	1 Gedung	26.741.137	100	25.000.000	1 Gedung	22.000.000	17	3.800.000	38	8.347.000	63	13.805.000	99	21.862.000	1 Gedung	47.814.000	2,17	72.814.000	2,72	Badan Penghubung Provinsi	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan;	Jumlah Pakaian Dinas dan Finger print	29	124.000.000	100	66.000.000	100	63.800.000	0	-	50	31.900.000	50	31.958.000	100	63.800.000		127.658.000	4,002	193.658.000	3,12	Badan Penghubung Provinsi	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas	33 stel	62.000.000	100	33.000.000	33 stel	31.900.000	0	-	100	31.900.000	100	31.900.000	100	31.900.000	33 stel	95.700.000	3,00	128.700.000	2,08	Badan Penghubung Provinsi	
		Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik	33 stel	62.000.000	100	33.000.000	33 stel	31.900.000	0	-	0	-	0	58.000.000	100	31.900.000	33 stel	31.958.000	1,00	64.958.000	1,05	Badan Penghubung Provinsi	
4		Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan;	Jumlah Pelayanan Kedinasan	115 kali	699.651.875		261.342.206	107 kali	591.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	14	85.398.800	29	173.771.668	115 kali	283.170.468	0,973	544.512.674	1,73	Badan Penghubung Provinsi	
		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	115 kali	315.000.000	100	261.342.206	107 kali	291.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	29	85.398.800	60	173.771.668	115 kali	283.170.468	0,97	544.512.674	1,73	Badan Penghubung Provinsi	
		Dialog/Audensi Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Prosentasmiliah masyarakat yang mengikuti dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat sekaligus perayaan halal bi halal	2 Keg	384.651.875	-	0	2 Keg	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Provinsi
5		Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media Massa Kegiatan;	Jumlah Liputan kegiatan pemerintah Daerah	14 kali	13.370.568		6.699.000	10 kali	11.000.000	25	2.750.000	34	3.750.000	60	6.550.000	100	11.000.000	24 kali	24.050.000	2,186	30.749.000	2,30	Badan Penghubung Provinsi	
		Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta	Jumlah Liputan	14 kali	13.370.568	67	6.699.000	10 kali	11.000.000	25	2.750.000	34	3.750.000	60	6.550.000	100	11.000.000	24 kali	24.050.000	2,19	30.749.000	2,30	Badan Penghubung Provinsi	
6		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Sanggar Kesenian dan Budaya Maluku	2 event + Dokumen	260.775.313		137.580.000	1 event	150.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	100	-	-	-	137.580.000	1,18	Badan Penghubung Provinsi
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah	Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah	2 event + Dokumen	200.000.000	96	94.680.000	-	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 sanggar	-	-	-	94.680.000	0,47	Badan Penghubung Provinsi
		Pengembangan Data Promosi dan Informasi pada Anjungan Daerah Maluku TMI	tersedianya Data da Informasi bagi pengunjung Anjungan Daerah	1 Dokumen	60.775.313	71	42.900.000	1 Dokumen Data	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen Data	-	-	-	42.900.000	0,71	Badan Penghubung Provinsi
7		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja OPD	3 Dokumen	299.000.000		-	3 Dok/ Laporan	285.488.160	19	53.528.800	28	79.360.700	53	152.065.500	92	263.631.206	3 Dok/ Laporan	548.586.206	7	548.586.206	6,46	Badan Penghubung Provinsi	

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi 2021		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renja OPD tahun 2020	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan renja PD tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										I	II	III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%	14 = 6x12	15 = 14/5x100%	16		
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dok/ Laporan	53.000.000		0	48.900.000	0	200.000	30	14.553.900	88	42.877.500	88	42.877.500	1 dok	100.508.900	2,06	100.508.900	1,90	Badan Penghubung Provinsi
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja OPD	1 Dok/ Laporan	53.000.000		0	48.900.000	84	40.835.600	84	40.835.600	84	40.835.600	84	41.035.600	1 dok	163.542.400	3,34	163.542.400	3,09	Badan Penghubung Provinsi
			Penyusunan Renja OPD	1 Dok/ Laporan	193.000.000		0	187.688.160	7	12.493.200	13	23.971.200	36	68.362.400	96	179.718.106	1 dok	284.534.906	1,52	284.534.906	1,47	Badan Penghubung Provinsi
Total Pagu Anggaran					7.119.176.209			13.830.931.000		836.000.000		1.547.000.000		2.666.058.000		12.151.118.939		17.200.176.939	46	21.681.045.105	54,70	

Jakarta, Januari 2021
KEPALA BADAN



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Badan Penghubung Provinsi Maluku**

Instansi : Badan Penghubung Provinsi Maluku

Kode Program/ Kegiatan	Prioritas/Fokus	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Reformasi birokrasi, pematapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian							25.591.446.538			21.920.413.555
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi				100	21.069.740.968			17.172.622.706
4	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jakarta		100	199.000.000		100%	208.950.000
4	01	01	1	01	01		1 Dokumen	15.000.000		100%	15.750.000
4	01	01	1	01	02		1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4	01	01	1	01	03		1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4	01	01	1	01	04		1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4	01	01	1	01	05		1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4	01	01	1	01	06		1 Dokumen	32.000.000		100%	33.600.000
4	01	01	1	02				1.012.000.000			1.062.600.000
4	01	01	1	02	03		29 Orang	863.000.000		100%	906.150.000
4	01	01	1	02	04		1 Dokumen	35.000.000		100%	36.750.000

Kode Program/ Kegiatan	Prioritas/Fokus	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1 02 05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jakarta			1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4 01 01 1 02 07		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan Triwulan	Jakarta			1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4 01 01 1 02 08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Tingkat Kesesuaian Laporan Prognosis	Jakarta			1 Dokumen	38.000.000		100%	39.900.000
4 01 01 1 03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah						350.076.256		100%	367.580.069
4 01 01 1 03 01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jakarta			1 Dokumen	9.000.000		100%	9.450.000
4 01 01 1 03 02		Pengamanan barang Milik Daerah	Jumlah Pegawai Kontrak Bidang Keamanan	Jakarta			8 Orang	300.076.256		100%	315.080.069
4 01 01 1 03 05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Jakarta			1 Dokumen	41.000.000		100%	43.050.000
4 01 01 1 04		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						38.000.000			39.900.000
4 01 01 1 04 01		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tingkat Kesesuaian urusan kepegawaian	Jakarta			12 bulan	38.000.000		100%	39.900.000
4 01 01 1 06		Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah						4.002.612.200			4.082.820.000
4 01 01 1 06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jakarta			12 Bulan	20.000.000		100%	21.000.000
4 01 01 1 06 02		Penyediaan Peralatan Rumah tangga (MESS)	Ptersedianya peralatan Kebutuhan Wisma Maluku di Jakarta	Jakarta			1 Paket	3.650.000.000		100%	3.832.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						114.212.200			
4 01 01 1 06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor.	Jakarta			12 Bulan	37.500.000		100%	39.375.000
4 01 01 1 06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jakarta			1 Paket	45.500.000		100%	47.775.000
4 01 01 1 06 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase penyediaan/pembelian jenis makana dan minuman untuk tamu	Jakarta			12 Bulan	35.400.000		100%	37.170.000
4 01 01 1 06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Jakarta			1 Kegiatan	100.000.000		100%	105.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jakarta				550.650.000			
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin penunjang penanganan covid dan kebersiahn pada Kantor Penghubung	Jakarta				16.000.000			

Kode Program/ Kegiatan	Prioritas/Fokus	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PENGADAAN MEBEL	Tersedianya Mebel pada Anjungan Daerah dan Banhub	Jakarta				26.500.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Perlengkapan Wisma)	Tersedianya peralatan penunjang sarana prasarana Kantor	Jakarta				508.150.000			
4	01	01	1	08				1.481.552.512			1.555.630.138
4	01	01	1	08	01						
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan									
4	01	01	1	08	01						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	Jakarta			12 Bulan	30.000.000		100%	31.500.000
4	01	01	1	08	02						
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik kantor	Jakarta			12 Bulan	951.400.000		100%	998.970.000
4	01	01	1	08	04						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Tersedianya tenaga supir, Cleaning service dan Office Boy	Jakarta			15 Orang	500.152.512		100%	525.160.138
4	01	01	1	09							
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.085.850.000		100%	9.855.142.500
4	01	01	1	09	01						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Terealisasinya pembayaran biaya Pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan selama 1 tahun	Jakarta			1 Paket	911.350.000		100%	956.917.500
4	01	01	1	09	02						
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Prosentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional selama 1 tahun.	Jakarta			1 Paket	1.488.000.000		100%	1.562.400.000
4	01	01	1	09	09						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jakarta			1 Paket	6.800.000.000		100%	7.140.000.000
4	01	01	1	09	11						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jakarta			1 Paket	186.500.000		100%	195.825.000
		Pengadaan kendaraan dinas operasional						1.350.000.000		100%	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Jakarta			3 unit	1.350.000.000		100%	
5											
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07										
		PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
5	07	01									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.321.705.570			2.437.790.849
5	07	01	1	02							
		Kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.321.705.570			2.437.790.849
5	07	01	1	02	01						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta			14 Bulan	2.321.705.570		100%	2.437.790.848,50
5	07	02									
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					100	2.200.000.000			2.310.000.000
5	07	02	1	01							
		Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						2.200.000.000		100%	2.310.000.000
5	07	02	1	01	01						
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta			12 Bulan	300.000.000		100%	315.000.000

Kode Program/ Kegiatan	Prioritas/Fokus	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatn	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023																					
				Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																				
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa																									
1				2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12	
5	07	02	1	01	02		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Kualitas pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta			2 Kegiatan	300.000.000		100%	315.000.000															
5	07	02	1	01	04		Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	meningkatkan fasilitas Produk unggulan	Jakarta			1 Paket	400.000.000		100%	420.000.000															
							Kegiatan Fasilitas Pameran Produk unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terwujudnya promosi serta pelestarian budaya dan kesenian daerah	Jakarta			1 Kegiatan	200.000.000		100%	210.000.000															
5	07	02	1	01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Daerah Bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jakarta			2 Kegiatan	1.000.000.000		100%	1.050.000.000															
													J u m l a h	25.591.446.538			21.920.413.555														

Anjungan 5.500.000.000

interior 1.300.000.000

32.391.446.538

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengukur dan menyusun Renstra OPD dalam lima tahun kedepan dan pada tiap tahunnya disusunlah rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi yang mengacu pada Renstra Badan Penghubung Provinsi tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang telah disepakati Renstra SKPD mengacu pada penjabaran dari RKPD yang memuat :

1. Visi misi OPD terhadap penjabaran Visi dan Misi Provinsi Maluku.
2. Program kerja OPD, sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dan membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas OPD, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya.
3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjelasan dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.
4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Renstra OPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk menegaskan permasalahan Daerah secara terencana dan berkelanjutan melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan kebijakan dan program strategis yang ada di Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian Visi Maluku Terkelola secara jujur, Bersih .

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Penghubung Provinsi Maluku ini mengacu pada dasar Hukum Renstra Provinsi tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan ;

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang 27 tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubahh dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud;

Renja Badan Penghubung adalah Dokumen Perencanaan Badan Penghubung Provinsi untuk periode 1(satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkup Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Tujuan;

- Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi bertujuan;
- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2021.
 - b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2021
 - c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan di laksanakan oleh Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta Tahun 2021 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Memuat tentang Renja Badan Penghubung Provinsi, Proses penyusunan Renja Badan Penghubung, keterkaitan antara renja Badan Penghubung dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Penghubung.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusuna Renja Badan Penghubung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok-Pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan penghubung, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Badan Penghubung Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi.

2.2. Anlisis Kineja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan orioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fubgsi Badan Penghubung Provinsi

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 di perlukan Evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada Tahun 2020 Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program dengan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.13.380.931.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Dalam Pelaksanaannya program-Program Tersebut Tidak Dapat di selesaikan seluruhnya karena terkendala Wabah Covid 19 yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan Program Kegiatan. Dengan demikian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 12.413.690.939,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta enam ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 91%.

Secara detail pelaksanaan untuk untuk program-program Badan Penghubung Provinsi tahun 2020 dapat di berikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.270.800.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.245.800.000,- (91%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 25.000.000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa surat-menyurat, berupa : Meterai 6000 dan 3000 sebanyak 700 lembar dan Paket pengiriman Barang kepala Daerah sebanyak 2500 kg

Hasil (Outcome) :

- Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.655.800.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.511.076.070,- (78%) dan realisasi fisik (100%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp.144.723.930,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa komunikasi 2 saluran dan penerangan Gedung Wisma Maluku dan rumah Dinas .

Hasil (Outcome) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.170.300.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.95.766.373,- (56%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.74.533.627,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional, berupa :

Belanja jasa perpanjangan ID Card Bandara sebanyak 7 orang, Belanja jasa premi Asuransi sebanyak 5 kendaraan roda empat dan Belanja surat tanda kendaraan bermotor sebanyak 11 kendaraan roda empat dan roda dua.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional kantor.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 24.990.000,- (100%) . Sehingga Terdapat sisa anggaran Rp.10.000,-,Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan dan peralatan pembersih, berupa : Kanebo sebanyak 15 buah, Kemoceng 15 buah, Pengharum ruangan sebanyak 120 buah, Pengharum mobil sebanyak 350 buah, Tissue basah sebanyak 65 buah, Tissue box sebanyak 90 dos, Semir mobil 10 buah, Pembersih kaca 30 buah, Kantong plastik sampah 100 pak, Semir mobil 10 buah, Sabun cuci cair 10 buah dll.

Hasil (Outcome) :

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 27.674.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.27.670.000,- (100%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor, berupa : Kertas sebanyak 205 rim, Kertas fax 15 rol, Map sebanyak 39 lusin (map batik, arsip, biasa dan plastik), Amplop besar dan kecil sebanyak 45 dos, Tinta sebanyak 45 bh (fotocopy, printer,stempel), Ballpoint 12 duz, Stabilo 1 lusin, Lem 2 buah, Spidol 15 bh, Clips 12 dos, Isi steples 19 dos, Tip ex 10 bh, Buku ekspedisi 10 bh dan Bahan lainnya.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran

f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.18.000.000,- (100%). Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan-bahan cetak dan penggandaan, berupa : Cetak kop surat sebanyak 14 rim, Cetak amplop sebanyak 31 pak, Cetak map sebanyak 300 lembar, , Fotocopy sebanyak 2500 lembar, Jilid 70 set

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.29.963.000. (99,9%) dan realisasi fisik 100%.sisa anggaran sebesar Rp.37.000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya komponen instalasi listrik, berupa : Lampu bohlam TL, Lampu pijar, dll, 212 buah, Lampu warna warni sebanyak 50 buah, Komponen listrik lainnya.

Hasil (Outcome) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

h) Penyediaan Makan & Minuman

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.198.684.344,- (99%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp.1.315.656, . Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

- Makanan dan minuman rapat untuk 25 kali rapat bagi 20 orang
- Makanan dan minum untuk pejabat sebanyak 25 kali bagi 20 orang
- Makanan dan minuman tamu untuk 86 kali kunjungan bagi 3 orang

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat – rapat dan kedinasan

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.554.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.475.580.866,- (86%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.78.419.134,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Pimpinan dan staf mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 33 kali di Ambon dan daerah lainnya.

Hasil (Outcome) :

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

j) Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi dan Teknis perkantoran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.897.411.840,- dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.884.436.640,- (94%) dan realisasi fisik 100%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran sebesar Rp.52.975.200,- capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 6 orang jasa tenaga sopir, 6 orang petugas kebersihan, 3 engineering, 4 orang administrator, 1 orang pelayan, 1 orang petugas bandara, 6 orang petugas keamanan dan 1 orang caraka.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak untuk mewujudkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor, yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pengadaan Mobil Jabatan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.7.819.657.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.7.683.225.470,- (98%) dan realisasi fisik 100%. Sehingga terdapat sisa anggaran Rp.136.431.530 Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Mercedes Benz,Nissan Terra,Lexus dan Alphard.)

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan operasional Gubernur dan wakil Gubernur di Ambon dan Jakarta.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada sisa anggaran, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 (Satu) buah Laptop,2 (dua) Personal Computer,1 (satu) buah Printer

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perkantoran.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 30.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Gedung Wisma Maluku terawat baik

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai gedung kantor.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.838.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai mencapai Rp.1.285.689.601,-(70%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp.552.310.339,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) : 12 unit kendaraan roda dua dan empat terawat dengan baik, Tersedianya 90.000 liter bahan bakar untuk 13 unit kendaraan, , Jasa Tol dan Parkir untuk 13 Unit kendaraan roda empat.

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan operasional dan kelancaran tugas-tugas operasional kantor.

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.81.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 56.766.701,- (70%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.24.233.299,- . Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

12 unit AC terawat baik, dan 1 buah unit Mesin Foto Copy,2 unit Lift,system aplikasi Kunci .

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai perlengkapan kantor.

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Dinas

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 14.600.000,- sehingga terdapat sisa sebesar Rp.400.000,-. (98%) dan fisik 100% Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

1 buah Rumah Jabatan Dinas

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa rumah jabatan kepala Badan Penghubung di Jakarta.

g) Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan gedung kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 19.805.000,- (95%) dan fisik 100%,sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.195.000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

8 Unit Komputer,6 buah Laptop,1 set sound system,4 Set alat musik

Hasil (Outcome) : Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor Badan penghubung di Jakarta.

h) Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung bercorak Kebudayaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.22.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 21.682.000,- (99%),- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya Gedunga Anjungan Maluku TMII

Hasil (Outcome) : Memperpanjang masa pakai gedung bercorak kebudayaan TMII.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.31.900.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.31.900.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga tidak terdapat sisa, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Pakaian Dinas Dan kelengkapannya bagi 29 orang ASN.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya Disiplin Aparatur

b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.31.900.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.31.900.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga tidak terdapat sisa, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Pakaian Dinas Putih bagi 29 orang ASN.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 291.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.771.668,- (100%) dan fisik (55%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp.117.228.332,-,- capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (output):

Pimpinan dan staf melakukan koordinasi dan pendampingan kepala daerah ke event-event Nasional sebanyak 6 kali keluar daerah dan 100 kali di Jakarta dan sekitarnya.

Hasil (outcome):

Konsistensi dan sinergitas pelaksanaan program kegiatan.

5) Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Informasi, komunikasi Pemerintah Daerah dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta yang menghasilkan dokumen dan publikasi Pemerintah Daerah Maluku di Jakarta, yang di implementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.11.000.000,- (100%) dan realisasi fisik (100%) capaian kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta sebanyak 11 kali

Hasil (Outcome) :

Kegiatan pemerintah daerah di Jakarta terpublikasi.

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 48.900.000,-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 42.877.500,- (87%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.022.500,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

- Terlaksananya Koordinasi penyusunan LKPJ

Hasil (Outcome) :

Kesesuaian laporan Pertanggungjawaban kepala Daerah.

b) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 48.900.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 41.035.600,- (83%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.864.400,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

- Terlaksananya Koordinasi penyusunan LKIP

Hasil (Outcome) :

- Kesesuaian laporan Kinerja pemerintah Daerah.

c) Penyusunan Renja OPD/Forum OPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 187.688.160,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 179.718.106,- (96%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.970.054,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

- Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja OPD

Hasil (Outcome) :

- Kesesuaian Rencana Kerja OPD.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di badan Penghubung Provinsi telah Optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran yang cukup besar, dalam rangka mewujudkan badan penghubung dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% dapat dikatakan kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator Kinerja tahun 2019 pada Renstra tahun 2019-2024 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Maluku dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Maluku yang terdapat pada visi misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target Kinerja dengan langkah-langkah yang berisi Program-Program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, hal ini dapat dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu :

2.2.1. Meningkatnya pelayanan tugas-tugas sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta. Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi di Jakarta pada tingkat

Nasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Badan Penghubung Provinsi Maluku berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perwakilan Daerah Provinsi.

2.2.2. Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD Provinsi Maluku tidak terlepas dari meningkatnya optimalisasi pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Provinsi Maluku. Dengan memanfaatkan potensi aset daerah Provinsi Maluku yang ada di Badan Penghubung, Anjungan Daerah Provinsi Maluku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diharapkan akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi jasa yang dilakukan. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 pendapatan dari hasil penerimaan retribusi selalu meningkat setiap tahunnya dan memenuhi target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2020 tidak mencapai target yang disebabkan adanya Wabah Covid 19 sehingga Pendapatan yang tidak sesuai target pada tahun tersebut. hal ini merupakan suatu kendala bagi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli.

Sedangkan untuk wisma Maluku yang pada Tahun ini sedang di lakukan Rehabilitasi sehingga tidak ada penghasilan sama sekali, kecuali pendapatan dari Penyewaan ruangan Kantor perwakilan Kabupaten kota dan Bank Maluku yang tadinya di kelola pihak ke 3 namun karena adanya rehabilitasi Gedung dan pemutusan Kerja sama dengan pihak ke 3 , maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta di berikan kewenangan untuk penagihan penyewaan dan pembayaran listrik yang langsung di setor ke RKUD Provinsi Maluku.

2.3.3. Pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kebijakan pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal Daerah Maluku dan pejabat Pemerintah Daerah Maluku yang dibantu dan difasilitasi sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta antara lain:

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ;
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada dalam rangka menunjang kegiatan sebagai perwakilan pemerintahan;
3. Belum dipahaminya arti penting Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di ibukota;

4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD di daerah dengan Badan Penghubung;
5. Belum representatifnya Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku;
6. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku;
7. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Badan Penghubung;
8. Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan Daerah Provinsi Maluku.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta belum dapat memenuhi target yang semula ingin dicapai disebabkan oleh ketidaksinergitas program antara Badan Penghubung Provinsi dengan Kabupaten Kota.

Program yang bersinergi antara Badan Penghubung Provinsi dengan Kabupaten/Kota sangat penting mengingat Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai Pintu Utama pelayanan yang ada di Jakarta. Jika program-program dapat bersinergi dengan baik maka tingkat pelayanan Badan Penghubung Provinsi akan lebih baik. Dengan dibukanya Kantor Perwakilan Kabupaten di Jakarta membuat pelayanan 1 pintu tidak dapat berjalan dengan baik atau terkotak kotak.

Program kegiatan Badan Penghubung Provinsi di Bidang promosi misalnya, tidak mendapat respon positif dari Kabupaten kota, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Apabila Kabupaten Kota dapat mendukung program Badan Penghubung Provinsi maka secara bersama-sama dapat mempromosikan Maluku dengan lebih baik.

Isu isu Strategis;

Dalam analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah di lakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas dapat di operasionalkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan Bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak di manfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Daerah perlu di selenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Beberapa permasalahan yang ada saat ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk segera di atasi agar tidak menjadi kendala di masa depan yang akan menghambat

tercapainya tujuan. Fokus perhatian kepada Sumber Daya Aparatur, Saran Prasarana maupun sistem yang ada menjadi isu dan Permasalahan strategis ke depan.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang pemerintahan umum secara umum, maka isu strategis berkembang saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu;

1. Belum representatif dan layaknya Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta
2. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur
3. Terbatasnya kewenangan yang di berikan kepada pada Badan Penghubung di Jakarta
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan Promosi Budaya dan Pariwisata
5. Kurangnya usaha pengenalan Kesenian dan Budaya Maluku di tingkat Nasional.

2.3.2. Masalah yang bersifat internal antara lain :

- a. Masih belum terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana yang representatif sehingga menyebabkan kurang kondusif dan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas.
- b. Masih belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
- c. Peningkatan eselon Badan Penghubung Maluku
Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Maluku yang saat ini masih berstatus eselon III secara struktural dapat melemahkan fungsi dan kinerja kelembagaan Badan Penghubung Daerah. mengingat tugas dan fungsi Badan Penghubung di Jakarta sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan sebagai Perpanjangan tangan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Jakarta.
- b. Belum maksimalnya Promosi Daerah karena tidak optimalnya pengembangan Promosi Daerah akibat dari tidak bersinerginya Kabupaten Kota dan Provinsi.
- c. Kurangnya pengenalan Budaya Maluku yang mengakibatkan tidak optimalnya pengembangan Promosi Budaya. Ketersediaan Sanggar Kesenian dan Budaya Maluku pada Anjungan Daerah di rasa sangat penting terhadap hal ini.

2.3.3. Masalah yang bersifat Eksternal :

- a. Belum dipahami secara baik tentang arti pentingnya Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
- b. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh setiap OPD pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Jakarta.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sebagai Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta

2.3.4. Dampaknya terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Provinsi yang saat ini masih berstatus eselon III, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketidaksinerginya Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dengan Kabupaten /Kota dalam melakukan promosi secara bersama-sama akan menghambat misi Kepala Daerah untuk

mewujudkan Masyarakat Maluku yang sejahtera dalam pengertian tidak terpenuhinya standard pelayanan minimal (SPM) , penguatan peningkatan ekonomi daerah, membina Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan intern umat beragama, yang merupakan bagian daripada misi Kepala Daerah.

2.3.5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu ;

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*.

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan .

Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 tahun 2017
2. Adanya komitmen untuk meningkatkan eselonering Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
3. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.
4. Adanya dukungan jumlah pegawai yang dimiliki.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kekurangmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarnya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal.
3. Keterbatasan dana yang ada pada Badan Penghubung.
4. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung.

TABEL 2.3 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

NO.	KEKUATAN (S)	NO.	KELEMAHAN (W)
1.	Adanya Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2017.	1.	Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung
2.	Adanya komitmen yang kuat untuk peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku	2.	Belum Aturan Pendukung
3.	Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.	3.	Kondisi sarana dan prasarana yang belum representatif dan memadai.
4.	Adanya dukungan jumlah pegawai yang di miliki	4.	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal

Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Opportunity (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

1. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.
2. Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.
3. Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan.
4. Kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, Media. LSM. Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia.

2. Threats (Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintah.

Ancaman-ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3. Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
4. Belum adanya dukungan Mendagri dalam peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku yang kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

TABEL II ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

No	Peluang (O)	No.	Ancaman (T)
1.	Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.	1.	Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah
2.	Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.	2.	Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3.	Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan	3.	Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta
4.	Kesempatan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, media, LSM / Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia	4.	Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku .

Dari hasil analisa SWOT dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Penghubung Maluku di Jakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Maluku di Jakarta yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Membuat perumusan kebijakan tentang peningkatan eselonering sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
2. Menyusun pedoman mengenai kegiatan yang akan diadakan pada Anjungan Daerah.
3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Strategi dan kebijakan yang akan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan dan kecakapan ;

- c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.
2. Strategi Membangun Koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk kepentingan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kerjasama yang optimal;
 - b. Melaksanakan hubungan yang terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan kualitas sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
 - b. Memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta .

Tantangan :

- a. Lemahnya fungsi dan kinerja kelembagaan yang disebabkan oleh kapasitas Jabatan Kepala Badan yang tidak sesuai dengan beban kerja yang dihadapi
- b. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur ;
- c. Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ;
- d. Masih belum dipahaminya akan arti penting fungsi dan kedudukan Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai perwakilan daerah di Jakarta.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Maluku belum cukup memadai
- f. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program-program di bidang promosi.

Peluang :

- a. Lokasi Kantor perwakilan yg berada di Ibukota Jakarta memberikan peluang untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan dan pelatihan pada pusat-pusat pelatihan yang ada di Jakarta
- b. Banyaknya organisasi masyarakat Maluku di Jakarta yang dapat diibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Jakarta.
- c. Peningkatan sarana prasarana perkantoran dapat dilakukan dengan standar harga Jakarta yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan standard harga Provinsi Maluku

- d. Adanya dukungan Badan pengelola Taman Mini Indonesia Indah untuk mempromosikan Maluku melalui program-program yang di biayai Yayasan Harapan Kita Jakarta.

2.3.6. Isu-isu penting :

1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur sesuai Tugas pokok dan fungsi.
2. Peningkatan pengelolaan sistem manajemen Keuangan
3. Peningkatan sarana prasarana Kantor
4. Optimalisasi Investasi dan pemanfaatan aset dan barang milik Daerah
5. Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi antar Daerah, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah
6. Optimalisasi pengembangan promosi budaya dan pariwisata
7. Peningkatan pembinaan kelompok kesenian Maluku pada anjungan daerah
8. Optimalisasi pelayanan bidang keprotokoleran

2.2.2. Program Prioritas Daerah

Program –Program Prioritas Daerah yang mengakomodir kegiatan- kegiatan prioritas adalah sebagai berikut;

1. Program pengembangan Nilai Budaya
 - a. Kegiatan Pembinaan seni Budaya
2. Program Pengembangan Pariwisata Daerah
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Event Pariwisata
3. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan
 - a. Kegiatan Kerjasama Antar Daerah
 - b. Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga

2.3. Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Perbandingan Program kegiatan Badan Penghubung Maluku pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah kebutuhan yang ada pada Badan Penghubung sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD atukah perlu ada pengurangan atau penambahan baik program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis Kebutuhan Program kegiatan yang ada dirasakan telah memenuhi kebutuhan yang ada Badan Penghubung Provinsi Maluku. Hanya ada penambahan beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk ditambahkan dalam program-program tersebut. setelah di analisa dan seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan terdapat bahwa Badan Penghubung Provinsi Maluku perlu memasukan Program/kegiatan baru demi kelancaran tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi di Jakarta Yang Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah Yang telah di sesuaikan dengan RPJMD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung

Penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Maluku ini mengacu pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang bertujuan untuk memberikan landasan dan arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam RENSTRA Badan Penghubung Provinsi dan mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah sebagai perluasan program agar dapat mencapai hasil secara optimal dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penanggulangan dan pengawasan.

3.2. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Yaitu :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah , Badan Penghubung Provinsi sebagai duta Daerah yang berada di Jakarta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan Kepala Daerah dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun melayani Masyarakat Maluku yang ada di Jakarta.
- b. Pendayagunaan potensi ekonomi Daerah
Badan Penghubung Provinsi sebagai pusat informasi, juga sebagai pintu gerbang Daerah yang ada di Pusat, mempunyai peranan dalam mempromosikan Daerah agar dapat menarik investor untuk datang dan berinvestasi di Daerah.
- c. Mengutamakan Program-Program Prioritas Daerah yang telah ditetapkan.

B. Rekapitulasi Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah Program dan kegiatan adalah 2 Program, 9 kegiatan dan 35 sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Pengamanan barang Milik Daerah
- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.e. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- d. sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

d. sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

1.h.Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

a.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan

1.g. Kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

2. Program Pelayanan Penghubung

2.a. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- d. Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

C. Lokasi Program keseluruhannya berada di Jakarta

D. Total kebutuhan dana sebesar Rp. 15,466,685,570

BAB IV

PENUTUP

Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan dan program- program harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi dapat tercapai, oleh karena itu Badan Penghubung Provinsi harus melakukan perencanaan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi program dan kegiatan saja namun juga meliputi penyediaan dana melalui APBD dalam rangka membiayai program dan kegiatan.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Fungsi Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan:

Rencana Kerja Tahunan sebagai proses penyusunan rencana kerja, merupakan penjabaran dari sasaran dan kebijakan yang telah di tetapkan Renstra dengan mengutamakan Prioritas Daerah serta Program dan kegiatan Prioritas Daerah.

Sehingga penyusunannya harus berpedoman kepada Renstra dan sesuai dengan tahun pelaksanaan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Fungsi Renstra untuk evaluasi kinerja LKIP OPD :

LKIP OPD adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran, perlu melakukan pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif mediator kinerja. dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang dicapai melalui indikator kinerja dapat meyakinkan perkembangan/kemajuan atau kegagalan kinerja, dengan demikian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra mempunyai peranan penting untuk mencapai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis Badan Penghubung Provinsi tahun 2019-2024, seluruh pegawai mulai dari staf harus mengetahui/mengerti visi, misi tujuan sasaran kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan serta berkewajiban untuk melaksanakannya sehingga apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam visi Badan Penghubung Provinsi dapat terlaksana.

Jakarta, Maret 2021

KEPALA BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI

Saiful Indra Patta,S.STP,M.Si

NIP. 19790320 199810 1 001